

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Keuangan Daerah

Berlandaskan PP RI No. 12 Tahun 2019, Finansial Daerah mencakup seluruh hak serta kewajiban daerah terkait pelaksanaan Pemda yang mana bisa dievaluasi secara wujud uang juga berbagai wujud kekayaan yang mana mampu dimiliki oleh daerah. Manajemen finansial daerah melibatkan keseluruhan aktivitas, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, juga pengawasan finansial daerah. Sementara itu, Finansial Desa ialah bagian dari finansial negara yang tertera didalam UU No. 17 Tahun 2003 terkait Keuangan Negara. UU itu menguraikan bahwasanya pendekatan didalam perancangan finansial negara meliputi berbagai elemen seperti objek, subjek, tahapan, serta tujuan. Secara umum, finansial negara melibatkan seluruh hak serta kewajiban negara yang mana bisa dinilai dengan uang, termasuk kebijakan serta aktivitas didalam sektor keuangan, moneter, serta manajemen aset negara, serta barang-barang yang mana digunakan untuk menjalankan hak serta kewajiban itu.

Dalam konteks badan, finansial negara meliputi semua entitas yang mana mempunyai atau mengatur badan-badan terkait, yakni: pemerintah pusat, pemda, badan usaha milik negara/daerah,

serta berbagai badan lainnya yangmana berhubungan dengan finansial negara. Berlandaskan sudut pandang tahapan, finansial negara melibatkan semua rangkaian aktivitas yangmana berhubungan dengan manajemen aspek-aspek ini, diawali dari pengembangan kebijakan, penetapan keputusan, sampai akuntabilitas. Sedangkan berlandaskan tujuan, finansial negara meliputi semua kebijakan, aktivitas, serta korelasi hukum yangmana berhubungan dengan kepemilikan dan/atau penguasaan terkait barang-barang itu didalam rangka mengatur tindakan pemerintah negara.

2.1.2 Laporan Keuangan Daerah

Berdasar pada SAK No.1 paragraf 9 (2018), laporan keuangan ialah penyajian yang terstruktur mengenai kedudukan serta performa finansial sebuah entitas. Fungsi dari laporan finansial ialah untuk menyediakan informasi tentang kondisi finansial, performa, serta arus kas entitas yangmana punya manfaat teruntuk pihak-pihak yang menggunakan laporan tersebut didalam tahapan penetapan keputusan ekonomi. Kemudian, laporan finansial mencerminkan kewajiban pengelolaan kepada pemanfaatan sumber daya yangmana diberikan pada mereka. Sementara itu, menurut Suteja (2018), Laporan finansial sejatinya ialah output dari tahapan akuntansi sebagaimana disusun belandaskan kriteria akuntansi yangmana diterima secara general dan dipakai guna menyampaikan

informasi finansial bagi berbagai pihak yangmana mempunyai kepentingan.

Berdasarkan pemaparan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwasanya laporan finansial daerah sangatlah penting untuk penetapan keputusan dari berbagai pihak. Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 terkait Standar Akuntansi Pemerintahan, elemen utama didalam laporan finansial meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, yangmana menggambarkan aktivitas finansial pemerintah pusat atau daerah serta memperlihatkan kepatuhan atas APBN atau APBD. Laporan Realisasi Anggaran memberikan ringkasan mengenai sumber, penggunaan, serta aplikasi dari sumber daya ekonomi yangmana dimanajemen oleh pemerintah pusat ataupun daerah selama kurun waktu pelaporan tertentu. Pada Permendagri 59 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tertera bahwa komponen sebagaimana termasuk didalam Laporan Realisasi Anggaran adalah:

- a. Pendapatan merupakan seluruh pemasukan uang daerah yangmana meningkatkan ekuitas dana didalam kurun waktu tahun anggaran terkait yang berupa hak Pemda, serta tidak butuh dikembalikan oleh Pemda.
- b. Belanja merupakan seluruh pengeluaran kas daerah yangmana menurunkan ekuitas dana selama tahun anggaran yangmana

relevan, serta pembayaran tersebut tidak akan dikembalikan oleh Pemda.

- c. *Surplus* atau *defisit* merujuk pada perbedaan antara pendapatan dan belanja yang tercatat pada item-item surplus atau defisit.
- d. SiLPA/SiKPA merupakan indikator dari selisih yang terjadi antara biaya yang direncanakan untuk suatu acara dan pemasukan yang terealisasi dalam periode anggaran.

Laporan kedudukan finansial, sebagaimana disebut neraca, memberikan data kepada pengguna tentang keadaan keuangan, mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat laporan dibuat. Dalam proses perencanaan, pengawasan, dan penilaian kinerja, pihak manajemen membutuhkan gambaran yang menyeluruh, dari ringkasan utama hingga rincian spesifik objek. Mardiamo (2007) pada bukunya yang menjabarkan bahwa unsur-unsur dalam laporan neraca dibagi menjadi tiga kategori, yakni:

- a. Aset memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi yangmana dipunyai oleh pemda, yangmana akan berguna bagi ekonomi serta sosial pada masa depan. Aset ini dibagi kedalam empat kategori: Aset lancar, Aset tetap, Investasi jangka panjang, serta Aset yang lain.
- b. Kewajiban, memberitahukan kepada pemakai laporan finansial mengenai utang pemerintah daerah atas pihak ketiga ataupun klaim pihak ketiga pada arus kas pemda.

Kewajiban ini dibagi kedalam dua kategori, yakni kewajiban jangka panjang serta kewajiban jangka pendek.

- c. Berlandaskan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam PP No. 71 Tahun 2010, *ekuitas* tidak dijelaskan secara rinci.

Laporan operasional menggambarkan pemakaian sumber daya ekonomi sebagaimana dimanajemen oleh pemerintah pusat ataupun daerah untuk meningkatkan pemerataan dan pemanfaatan dalam kegiatan pemerintah selama kurun waktu pelaporan. Berbagai unsur yangmana secara langsung tercakup pada Laporan Operasional meliputi pemasukan, biaya, alokasi, dan item-item luar biasa.

Laporan Arus Kas memberikan data tentang pergerakan kas yang berhubungan dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, serta transisi, serta mencakup saldo awal, pemasukan, pengeluaran, serta saldo akhir kas pemerintah pusat ataupun daerah didalam kurun waktu tertentu. Aspek utama didalam Laporan Arus Kas ialah pemasukan serta pengeluaran kas. Sementara itu, Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi tentang perubahan ekuitas dari tahun laporan dibanding dengan tahun yang lalu, menunjukkan apakah ada peningkatan atau penurunan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memberikan berbagai pos berikut lewat perbandingan pada kurun sebelumnya:

- a. Saldo anggaran Lebih awal
- b. Pemanfaatan saldo anggaran lebih
- c. Sisa Lebih/Kurang pendanaan anggaran tahun berjalan
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- e. Lain-lain saldo anggaran lebih akhir.

Selain itu, sebuah entitas pelaporan menyediakan detail lebih dalam mengenai berbagai elemen yangmana ada didalam laporan perubahan saldo anggaran lebih didalam dokumentasi laporan finansial.

2.1.3 Kinerja

Kinerja, yang juga dikenal sebagai prestasi kerja, merujuk pada tingkat keberhasilan seorang karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Kinerja bukanlah suatu atribut pribadi contohnya bakat ataupun kemampuan, melainkan manifestasi dari bakat ataupun kemampuan tersebut, serta hasil dari upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menuntaskan tugas atau tanggung jawab dalam periode waktu tertentu. Kinerja dipengaruhi oleh motivasi dan kemampuan; seseorang harus memiliki tingkat motivasi dan kemampuan yang memadai untuk menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan dengan baik. Menurut Ivancevich, seperti dikutip oleh

Kasmir (2015: 183), kinerja ialah hasil yang dicapai sesuai dengan harapan atau tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi ataupun perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa peran atau kegunaan kinerja yang dapat ditemukan, yaitu:

- a. Kinerja berhubungan dengan derajat hubungan proses antar suatu tugas dan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, serta pengalaman dalam diri seorang individu.
- b. Kesempatan melaksanakan hal-hal yang mana berkenaan dengan tersedianya teknologi
- c. Kerelaan melaksanakan yang mana berkaitan dengan kemauan serta kesediaan untuk berusaha menggapai performa.

2.1.4 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja ialah hasil dari pelaksanaan program ataupun aktivitas yang telah dilakukan ataupun bisa dilakukan dengan memanfaatkan dana didalam jumlah serta mutu yang cukup (Sholikhah & Khoiriawati, 2022). Menurut tolok ukur performa yang diatur dalam PP No. 13 Tahun 2019 perihal Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja mencakup input, output, serta hasil (PP RI No. 13 Tahun 2019 perihal Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019). Performa bisa diartikan selaku taraf pencapaian individu ataupun organisasi dalam memanfaatkan dana teruntuk aktivitas yang mana

dinilai dari segi mutu dan jumlahnya, serta dievaluasi untuk mencapai sasaran tertentu.

Tetapi, kinerja keuangan yang diukur menggunakan indikator seperti profitabilitas, akun, kecukupan modal, likuiditas, dan solvabilitas, mencerminkan kondisi keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu. Sementara itu, Kinerja keuangan daerah dapat dievaluasi melalui penggunaan indikator khusus yang dirancang untuk finansial daerah. Satu dari sekian cara guna mengevaluasi performa finansial daerah ialah melalui analisa perbandingan finansial daerah. Metode tersebut bertujuan mengevaluasi sejauh mana pemda bertanggung jawab didalam manajemen finansial daerah. Analisis ini tidak hanya menggambarkan bagaimana dana publik dipakai, namun turut memastikan bahwasanya dana itu dikelola dengan cara yang ekonomis, efisien, serta efektif (Rahayu & Jumaili, 2020). Manajemen finansial daerah bisa mempengaruhi tercapainya atau tidaknya tujuan keuangan daerah.

2.1.5 Analisis Laporan kinerja Keuangan

Berlandaskan Harahap (2015), Analisa laporan finansial meliputi proses membagi elemen-elemen laporan finansial kedalam informasi yangmana lebih sederhana serta menilai keterkaitan penting antara elemen-elemen tersebut, baik yang bersifat kuantitatif ataupun non-kuantitatif, bermaksud memberi gambaran yang lebih

jelas mengenai kondisi keuangan yangmana amat penting guna penetapan keputusan yang akurat. Proses tersebut mencakup penilaian terhadap posisi keuangan perusahaan guna mengevaluasi kinerja finansialnya. Tujuan utama dari analisa laporan finansial ialah guna memahami serta menilai performa finansial perusahaan.

Berlandaskan Kasmir (2018), Tujuan dari evaluasi finansial adalah:

- a. Mengevaluasi kedudukan finansial perusahaan selama kurun waktu tertentu, termasuk aset, utang, ekuitas, serta pencapaian hasil usaha perusahaan dalam sejumlah periode.
- b. Mengidentifikasi berbagai kelemahan yangmana menjadi kekurangan dalam perusahaan.
- c. Mengidentifikasi berbagai keunggulan yangmana dimiliki oleh perusahaan.
- d. Menetapkan berbagai langkah perbaikan yangmana diperlukan perusahaan pada masa depan terkait dengan kondisi finansial perusahaan sekarang ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya evaluasi laporan finansial biasanya dilakukan guna menghimpun data, memahami keadaan finansial perusahaan, serta merencanakan tindakan berikutnya. Kemudian, analisa ini pun berfungsi guna menilai kesehatan finansial melalui mengevaluasi

hasil yang diperoleh. Analisis laporan keuangan pada dasarnya melibatkan penelaahan berbagai informasi sebagaimana disajikan didalam laporan finansial. Ketidaksamaan antara analisa laporan finansial untuk bisnis serta bidang publik ada di objek yang dianalisis. Penerapan analisa perbandingan finansial dalam bidang publik masih terbatas, sehingga belum ada kesepakatan mengenai istilah dan standar pengukurannya secara teoritis (Halim, 2012). Walaupun begitu, agar transparansi serta akuntabilitas didalam manajemen finansial daerah bisa terjamin, analisa rasio finansial masih wajib diterapkan didalam laporan finansial pemda, meski begitu dasar akuntansi yang digunakan berbeda dari yang diterapkan pada laporan keuangan sektor swasta. Pemda mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan aktivitas pembangunan.

Berlandaskan Halim (2012), Para pihak yangmana punya kepentingan terhadap laporan finansial APBD meliputi DPRD, lembaga eksekutif, pemerintah pusat ataupun provinsi, juga masyarakat serta kreditur. Terdapat berbagai metode guna mengevaluasi performa finansial daerah, satu di antaranya ialah menerapkan perbandingan finansial daerah. Sejumlah perbandingan yangmana bisa diterapkan meliputi: rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi finansial daerah, rasio keselarasan, rasio pertumbuhan, rasio kemandirian finansial daerah, tingkat desentralisasi, serta rasio ketergantungan pemda.

1. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas mengidentifikasi sejauh mana pemda berhasil mewujudkan PAD dan pajak daerah sesuai dengan target yang mana telah ditentukan berdasar pada potensi sebenarnya daerah. Makin meningkatnya nilai Rasio Efektivitas PAD dan pajak daerah, menyebabkan makin baik performa pemda.

2. Rasio Efisiensi Finansial Daerah

Perbandingan Efisiensi PAD menunjukkan perbandingan pada biaya yang mana dipakai guna menghasilkan pendapatan dengan jumlah pendapatan yang mana berhasil direalisasikan.

3. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menunjukkan bagaimana pemda membagi dana antara belanja operasional serta belanja modal secara efektif. Ketika proporsi dana yang diperuntukkan bagi belanja operasional meningkat, menyebabkan proporsi belanja modal yang mana dimanfaatkan bagi pengadaan fasilitas ekonomi masyarakat biasanya akan menurun.

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menilai kemampuan pemda didalam menjaga serta memperbaiki kemajuan yangmana sudah diraih seiring berjalannya waktu.

5. Rasio Kemandirian Finansial Daerah

Perbandingan Kemandirian Finansial Daerah memperlihatkan seberapa jauh sebuah wilayah dapat membiayai aktivitas pemerintah, pembangunan, serta pelayanan publik melalui memanfaatkan pemasukan yang diperoleh dari pajak serta retribusi yangmana dibayar oleh masyarakat.

6. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Perbandingan Tingkat Desentralisasi Fiskal mengukur sejauh mana pemda mampu menaikkan PAD untuk mendanai kegiatan pembangunan.

7. Rasio Ketergantungan pemerintah Daerah

Perbandingan ketergantungan finansial daerah dihitung melalui perbandingan total pendapatan transfer yangmana diterima dengan keseluruhan pemasukan daerah. Perbandingan yang lebih besar mengidentifikasi tingkat ketergantungan lebih besar dari pemda pada pemerintah pusat serta provinsi.

8. Rasio Aktifitas

Perbandingan ini menunjukkan sejauh mana pemda mengutamakan pembagian dana antara belanja rutin (belanja operasi) serta belanja pembangunan (belanja modal) dengan efisien. Jika persentase dana sebagaimana diperuntukkan bagi belanja rutin semakin tinggi, menyebabkan persentase dana untuk belanja investasi (belanja pembangunan) yangmana dimanfaatkan guna membangun sarana serta prasarana ekonomi masyarakat cenderung makin rendah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Studi ini berkaitan erat dengan studi sebelumnya, dengan tujuan untuk memperkuat dan membandingkan temuan-temuan tersebut. Penelitian ini difokuskan pada pemda Kabupaten Tegal

Tabel 2.1 Berikut hasil penelitian yang relevan, di antaranya:

Nama Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Analisis Data	Hasil
Fera Maulina, Rhea, 2019	“Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Kemandian Keuangan Daerah - Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 	Berdasarkan evaluasi serta analisis terhadap performa finansial daerah, bisa diambil kesimpulan bahwasanya hubungan antara

	Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat”	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Efektifitas - Rasio Efisiensi - Rasio Kerserasian Belanja - Rasio Pertumbuhan 	<p>taraf kemandirian serta desentralisasi fiskal pemerintah Provinsi Kalimantan Barat termasuk kedalam kelompok “partisipatif”, efektivitasnya dikategorikan sebagai “efektif”, sementara efisiensinya dikategorikan sebagai “kurang efisien”. Rasio Harmoni mengindikasikan adanya fluktuasi dalam pertumbuhan serta ketimpangan dalam pengeluaran.</p>
Hery Susanto, 2019	“Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja Keuangan pemerintah daerah kota Mataram”	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Efektifitas - Rasio Efisiensi - Rasio Kemandirian Finansial Daerah - Rasio Aktivitas - Rasio Pertumbuhan 	<p>Temuan studi mengungkapkan bahwasanya rasio efektivitas diasumsikan berhasil, rasio efisiensi dinilai tidak memadai, serta rasio kemandirian manajemen</p>

			<p>finansial daerah tetap tergolong rendah. Studi turut menunjukkan bahwasanya rasio pertumbuhan elemen PAD serta rasio aktivitas berada dalam kondisi yang kurang baik. Kemudian, pertumbuhan belanja dinilai kurang memadai sebab bagian belanja operasional lebih banyak daripada belanja modal. Dihimbau Pemda Kota Mataram bisa memperbaiki PAD serta mengutamakan alokasi pengeluaran daerah.</p>
Novira Sartika,2019	<p>“Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Efisiensi Keuangan Daerah - Rasio Kemandirian Finansial Daerah 	<p>Berdasarkan evaluasi, performa finansial Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti amat efisien. Hal</p>

	Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti”	<ul style="list-style-type: none"> - Derajar Desentralisasi - Rasio Efektivitas PAD - Rasio KecerAsian 	demikian dihitung memanfaatkan perbandingan efisiensi finansial daerah yangmana rata-ratanya mencapai 72,84%, perbandingan kemandirian keuangan daerah yangmana rata-ratanya 3,45%, serta perbandingan efektivitas PAD yangmana rata-ratanya 103,65%. Angka-angka tersebut menunjukkan tingkat efisiensi finansial daerah yang baik.
Z Zulkarnain, 2020	“Analisis rasio keuangan daerah untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat”	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Desentralisasi Fiskal - Rasio Ketergantungan Finansial Pemda - Rasio Efektivitas PAD 	Hasil perhitungan perbandingan desentralisasi fiskal mengindikasikan bahwasanya kabupaten dan kota di Jawa Barat mempunyai kapasitas finansial yang masih tergolong “kurang”.

		<p>- Rasio Belanja Modal</p>	<p>Sementara itu, pengukuran Rasio Ketergantungan Finansial Pemda memperlihatkan bahwasanya tidak terdapat pemda di Jawa Barat yang mana ketergantungannya akan dana transfer berada pada kategori “RENDAH”. Kemudian, penilaian rasio efektivitas PAD memperlihatkan bahwasanya mayoritas pemda di Jawa Barat masih berada dalam kategori tersebut. Penelitian ini memiliki beberapa batasan. Penelitian lebih lanjut dapat memperluas ruang lingkup uji atau evaluasi, misalnya dengan menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi</p>
--	--	------------------------------	--

			performa finansial penda ataupun dampak keadaan faktual pada performa finansial tersebut.
Melina Febi Awani & Swarmilah Hariani, 2021	“Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Kemandirian Finansial Daerah - Rasio Efesiensi - Rasio Efektivitas - Rasio Pertumbuhan Pendapat 	Temuan studi mengungkapkan bahwasanya, pada periode 2015 hingga 2018, taraf kemandirian daerah di semua Kabupaten di pulau Sumatera ada di level paling rendah, dengan rata-rata hasil 25%. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya manajemen belanja daerah di semua kabupaten di pulau Sumatera kemungkinan kurang optimal, sedangkan manajemen PAD dianggap efektif, dengan rentenir yang lebih rendah

			dibanding yang diinginkan.
--	--	--	----------------------------